

GROSS NATIONAL HAPPINESS (GNH) SEBAGAI COUNTER-DISDISCOURSE BHUTAN TERHADAP DISKURSUS PEMBANGUNAN GLOBAL

Oleh **Joanda Kevin Yoga Aditama**

20150510305

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
joanda.kevin.2015@fisipol.umy.ac.id

ABSTRACT

This paper explains about the effort of Bhutan to propose Gross National Happiness (GNH) as an alternative of global development discourse. Using the theory of counter-discourse from Michael Foucault, this research findings proof that GDP as part of the economic development discourse, a dominant development discourse, is only a regime of truth which constructed by the Western countries. Economic development with its GDP tangibly proven are failed to measure and at the same time bring happiness and well-being to the society. Therefore, Bhutan continuously promoting GNH through its various policies. Until the majority of countries and international world in general, slowly accept the GNH as an alternative for their orientation of the development agenda.

Keywords: *Bhutan, global development, counter-discourse, Gross National Happiness, Gross Domestic Product*

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi menjadi sebuah diskursus pembangunan yang paling banyak digunakan oleh mayoritas negara di dunia. Namun ketika negara-negara tersebut lebih mengutamakan pembangunan ekonomi dengan *Gross Domestic Product* (GDP) sebagai indikator keberhasilan pembangunannya, Bhutan tetap mengutamakan *happiness based-development* dengan indeks pembangunan *Gross National Happiness* (GNH).

Tulisan ini akan memberikan pemaparan mengenai alasan di balik usaha Bhutan dalam mengimplementasikan dan mempromosikan GNH ke dunia internasional. Termasuk penjelasan tentang apa yang kemudian menjadi penyebab GDP tidak relevan dan kurang berhasil sebagai sebuah indikator keberhasilan pembangunan dibanding GNH menggunakan kerangka analisis empat pilar GNH.

Lebih jauh, tulisan ini akan menunjukkan berbagai bentuk usaha Bhutan dalam upayanya melakukan *counter-discourse* GDP melalui GNH, mulai dari diplomasi hingga kebijakan luar negeri. Di samping itu tulisan ini juga menunjukkan beberapa bukti terjadinya sebuah anomali dalam perpolitikan dunia, bahwa negara sekecil Bhutan dapat membawa GNH sebagai sebuah alternatif diskursus pembangunan global.

Kegagalan *Gross Domestic Product* dalam Mengukur Kebahagiaan

Pembangunan ekonomi merupakan diskursus pembangunan global yang digunakan oleh mayoritas negara di dunia. Dengan menggunakan GDP negara-negara tersebut bisa mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah mereka canangkan. Turun naiknya tren pertumbuhan ekonomi pun menjadi rujukan dan bahan pertimbangan utama dari pemerintah negara untuk menentukan kebijakan apa yang harus dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan pembangunan, maupun untuk meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi yang sudah baik. Meskipun demikian GDP dianggap tidak terlalu cocok digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan, karena ketidakmampuan dalam mengukur aspek-aspek kehidupan (Drabsch, 2012).

Asumsi yang berkembang adalah negara kaya dengan perekonomian maju, pertumbuhan ekonomi pesat, dan GDP yang tinggi, akan berdampak pada peningkatan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat negara tersebut. Secara tidak langsung hubungan kausal yang terjadi adalah apabila GDP tinggi, maka masyarakat akan sejahtera dan bahagia. Asumsi ini berkaitan dengan pemahaman umum bahwa kesejahteraan dapat diperoleh melalui aktivitas konsumsi, seperti makanan, rumah, pakaian, hiburan, dan berbagai hal lainnya (Conceição & Bandura, 2008). Sehingga ketika kesejahteraan tercapai, maka akan timbul kebahagiaan. Namun hal ini mulai diragukan oleh Moses Abramovitz melalui esei yang ia tulis dengan judul "*The Welfare Interpretation of National Income and Product*". Abramovitz menyimpulkan bahwa kita harus skeptis terhadap pandangan bahwa peningkatan kesejahteraan dapat diukur dengan hitungan kasar, seperti salah satunya pendapatan (Easterlin, 1974). Pendapat Abramovitz ini

terjawab dari hasil penelitian yang dipublikasikan oleh Richard A. Easterlin pada tahun 1974 (Drabsch, 2012). GDP dianggap hanya mengukur kualitas pembangunan dari segi ekonomi, tanpa melibatkan aspek lingkungan, budaya, maupun kualitas hidup manusia (Fidelis, Tisott, & Rodrigues, 2017).

Richard A. Easterlin merupakan seorang profesor di University of Southern California (USC Dornsife, 2018). Ia dikenal dengan *Easterlin Paradox*-nya yang secara garis besar menyatakan bahwa negara yang semakin kaya tidak akan menjamin masyarakatnya semakin bahagia (Hafsah, 2017). Bahwa kebahagiaan dan pendapatan setiap negara berbeda, namun peningkatan pendapatan tidak selalu diiringi dengan peningkatan tingkat kebahagiaan (Economic and Social Research Council, 2018). Menurut Andrew E. Clark dan Claudia Senik dalam tulisan mereka yang berjudul “*Will GDP growth increase happiness in developing countries?*”, terdapat dua alasan mengapa hal ini disebut paradoks. Pertama yaitu karena perbedaannya dengan pemahaman awam, bahwa ketika memiliki banyak materi dan hak memilih lebih besar, maka akan mendorong kesejahteraan dan kebahagiaan (Clark & Senik, 2011). Kedua, yaitu karena data yang disajikan berbanding terbalik dengan data yang ada di internal berbagai negara (Clark & Senik, 2011).

Paradoks ini terkenal saat Richard D. Easterlin mempublikasikan hasil penelitian dengan judul “*Does Economic Growth Improve the Human a Lot? Some Empirical Evidence*” pada tahun 1974. Paradoks ini didasari atas data penelitian *NORC Polls* yang meneliti distribusi kebahagiaan di tiga tahun berbeda, yaitu tahun 1957, 1963, dan 1965 (Easterlin, 1974). Hasilnya, kebahagiaan warga Amerika Serikat justru semakin menurun. Dengan salah satu kategorinya “sangat bahagia” dari 35 di tahun 1957, 32 di tahun 1963, menjadi 30 di tahun 1965 (Easterlin, 1974). Padahal GDP Amerika Serikat di tiga tahun tersebut cenderung terus mengalami kenaikan, yaitu 2.994 triliun dolar di tahun 1957, 3.703 triliun dolar di tahun 1963, dan 4.171 triliun dolar di tahun 1965 (Amadeo, 2018).

Selain itu, dalam publikasi Easterlin tersebut terdapat pula hasil penelitian yang menunjukkan perbandingan kebahagiaan dan pendapatan di 14 negara. Seperti yang tertera dalam tabel 4.1, terdapat beberapa negara yang menjadi

representasi negara maju, seperti Amerika Serikat dan Italia, serta negara berkembang seperti Filipina dan Nigeria. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa tingginya angka pendapat tidak linear dengan tingkat kebahagiaan. Contohnya adalah Amerika Serikat yang pendapatan per orang mencapai 2.790 dolar memiliki indeks kebahagiaan sebesar 6.6 (Easterlin, 1974). Di sisi lain terdapat Kuba dengan pendapatan per orang hanya mencapai 516 dolar, yang kurang lebih 1/5 dari pendapatan per orang di Amerika Serikat. Namun dari penelitian tersebut Kuba bisa menempati posisi kedua sebagai dalam tingkat kebahagiaannya dengan indeks 6.4 (Easterlin, 1974). Padahal, masih ada Israel, Jerman Barat, yang pendapatan per orang lebih tinggi dari Kuba, yang masing-masing memiliki indeks kebahagiaan yang sama yaitu 5.3 (Easterlin, 1974).

Tabel 1 Tingkat kebahagiaan dan pendapatan setiap individu di 14 negara pada tahun 1960.

Country	Period of survey	(1) Rating of personal happiness (min: 0; max: 10)	(2) Real GNP per head 1961 (S.U.S.)
United States	Aug. 1959	6.6	2790
Cuba	Apr.–May 1960	6.4	516
Egypt	Fall 1960	5.5	225
Israel	Nov. 1961–June 1962	5.3	1027
West Germany	Sept. 1957	5.3	1860
Japan	Fall 1962	5.2	613
Yugoslavia	Spring 1962	5.0	489
Philippines	Spring 1959	4.9	282
Panama	Jan. –Mar. 1962	4.8	371
Nigeria	Sept. 1962–spring 1963	4.8	134
Brazil	Late 1960–early 1961	4.6	375
Poland	Spring 1962	4.4	702
India	Summer 1962	3.7	140
Dominican Republic	Apr. 1962	1.6	313
Average		5.0	

Sumber: “Does Economic Growth Improve the Human a Lot? Some Empirical Evidence” oleh Richard A. Easterlin.

Hasil penelitian di atas menjadi penguat bahwa negara kaya tidak selalu bahagia dan tidak selalu lebih bahagia dari negara yang miskin atau memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah. Fakta ini dapat diperkuat dengan sebuah bab dalam *World Happiness Report 2017* yang berjudul “Restoring American Happiness” (Helliwell, Layard, & Sachs, 2017). Dimana dalam bab tersebut

ditunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2006-2016, indeks kebahagiaan warga Amerika Serikat cenderung menurun dari 7.35 di tahun 2006 menjadi 6.83 di tahun 2016 (Helliwell, Layard, & Sachs, 2017). Padahal GDP Amerika Serikat meningkat dari tahun 2006 sebanyak 15.338 triliun dolar menjadi 17.659 triliun dolar di tahun 2016 (Amadeo, 2018).

Perspektif *Counter-Discourse* oleh Michael Foucault

Fenomena ini juga dapat dianalisis menggunakan sudut pandang *counter-discourse* milik Michael Foucault yang menghadirkan konsep *regime of truth* dan *game of truth*. Menggunakan pandangan kritis Michael Foucault, pembangunan ekonomi beserta GDP sebagai indikator pembangunan dinilai hanya menciptakan iklim pendisiplinan negara yang diciptakan oleh negara-negara Barat. Belum lagi adanya *labelling* keberhasilan pembangunan ekonomi, yang semakin memperkuat pembangunan ekonomi sebagai diskursus tunggal pembangunan yang menghegemoni (Collins, 2016). Dengan acuan yang dipercaya oleh mayoritas negara di dunia, pembangunan ekonomi perlahan terkonstruksi menjadi sebuah solusi terbaik dari segala permasalahan pembangunan. GDP sebagai indeks pembangunan pun digunakan sebagai rujukan dalam perencanaan pembangunan, rasionalisasi dan evaluasi program pembangunan, dan indikator berhak tidaknya suatu negara mendapat bantuan pembangunan (Haque, 2004).

Meminjam istilah dari Michael Foucault, pembangunan ekonomi dengan GDP sebagai indikator keberhasilan pembangunannya yang menghegemoni ini dapat disebut sebagai sebuah *regime of truth*. Bahwa pembangunan ekonomi dengan sistem dan indeks yang ada di dalamnya tidak lebih dari sebuah mitos, yang kebenarannya secara politis di desain oleh negara-negara Barat. Terbukti dengan penggunaan *gold standard* sebagai sebuah sistem ekonomi yang pertama kali mendasari terbentuknya diskursus pembangunan ekonomi. Dimana dengan sistem tersebut Inggris ingin lebih mengontrol ekonomi negara-negara di dunia (Igwe, 2018). Peningkatan tingkat investasi hingga peningkatan pendapatan negara pun menjadi tolok ukur kesejahteraan negara. Belum lagi dengan adanya narasi bahwa semakin tinggi tingkat konsumsi maka akan semakin tinggi pula

tingkat kesejahteraan (Pettinger, 2016). Ketika suatu negara telah terjebak dalam narasi tersebut, maka mau tidak mau mereka akan masuk aturan main dari diskursus pembangunan ekonomi, yang diagungkan oleh negara-negara Barat untuk mengatur perekonomian dan pembangunan di dunia. Apabila kembali meminjam istilah dari Michael Foucault, hal ini disebut sebagai *game of truth*. Yaitu aturan main yang baik langsung maupun tidak langsung tercipta dari pembangunan ekonomi sebagai sebuah *regime of truth*.

Termasuk kehadiran *World Bank* dan IMF dalam aturan main tersebut, yaitu sebagai institusi yang diposisikan sebagai “dewa penolong” ketika ada negara yang merasa kesulitan dalam mengejar target keberhasilan pembangunan GDP yang berorientasi pada hal-hal bersifat materialistik. Dimana pendidikan, kesehatan, hingga kelayakan tempat tinggal tidak termasuk dalam pengukuran GDP (Dang & Pheng, 2015). Akibatnya, aspek lain seperti lingkungan dan manusia pun terabaikan dalam agenda pembangunan, yang bahkan mendapat dampak negatif dari pembangunan yang dicanangkan. Bagi lingkungan, pembangunan yang tidak terkontrol dan berorientasi materialistik hanya akan menyebabkan konflik sumber daya alam, perubahan iklim, dan kepunahan spesies tumbuhan dan hewan akibat kerusakan habitat (Czech, 2015). Sedangkan bagi manusia, hal tersebut akan berdampak buruk pada pembangunan manusia (*human development*). Seperti yang disebutkan dalam tulisan berjudul “*The Myths of Economic Growth (GNP): Implications for Human Development*” yang ditulis oleh M. Shamsul Haque. Bahwa pembangunan ekonomi mendorong terjadinya eksploitasi pekerja, komodifikasi manusia, dan mengurangi kualitas hidup individu manusia (Haque, 2004).

Bahkan pemberian bantuan keuangan oleh *World Bank* dan IMF kepada negara berkembang tanpa adanya arah kebijakan dan *rule of law* yang jelas hanya menambah beban hutang negara (Eiras, 2003). Dengan dampak semakin terhambatnya pembangunan di negara tersebut. Pendekatan solusi pembangunan yang menurut Joseph Stiglitz dalam tulisan Scott A. Beaulier bersifat “*one-size-fits-all*” pun juga menjadi permasalahan tersendiri, mengingat setiap negara menghadapi permasalahan yang berbeda-beda (Beaulier, 2004). Sehingga,

kebahagiaan warga negara yang seharusnya didapat dari agenda pembangunan menjadi tidak terpenuhi. Padahal jika dilihat dari sudut pandang GNH, kebahagiaan harus memenuhi empat pilar utama, yaitu pembangunan sosial ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, konservasi lingkungan, pelestarian dan promosi kebudayaan, dan *good governance*. Sedangkan akibat negara yang berfokus pada target GDP membuat keempat pilar tersebut tidak dapat dipenuhi sebagai sebuah pondasi awal dari pembangunan yang mendorong terciptanya kebahagiaan. Menggunakan analisis empat pilar GNH, berikut beberapa contoh yang membuktikan bahawa orientasi berlebih pada GDP justru banyak memberikan dampak negatif dan tidak memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan:

Pembangunan sosial ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan

Bagi negara yang menganut pembangunan ekonomi, mau tidak mau mereka harus mengikuti aturan main rezim ekonomi internasional. Negara-negara tersebut harus memenuhi syarat tertentu agar mampu memenuhi target GDP untuk dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Salah satunya yaitu dengan membuka sebesar-besarnya peluang investasi dan masuknya perusahaan asing ke dalam suatu negara. Namun keterbukaan yang diharapkan mampu membawa kesejahteraan justru menimbulkan permasalahan baru dan membuat gap ekonomi semakin lebar. Salah satu contohnya adalah kehadiran perusahaan kopi *Starbucks* di Ethiopia. Dimana kehadiran mereka tidak lepas dari kebutuhan negara untuk menciptakan kesejahteraan dengan memaksimalkan komponen GDP, seperti konsumsi sektor privat, investasi, dan ekspor (Madalina, 2015). *Starbucks* membayar murah tenaga yang bekerja di kebun dan membeli harga hasil perkebunan masyarakat Ethiopia dengan sangat rendah (Moyo, 2014). Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil perkebunan kopi penduduk Ethiopia hanya dihargai sebesar 1.45 dolar Amerika per kilogram oleh *Starbucks* (Faris, 2007). Di sisi lain *Starbucks* menjual kopi dari perkebunan Ethiopia ini, yang salah satunya kopi olahan dengan nama *Shirkina Sun-Dried Sidamo*, dengan harga per bungkusnya sebesar 26 dolar Amerika (Faris, 2007). Akibat adanya praktik ini, menurut Oxfam kehadiran *Starbucks* di Ethiopia telah merugikan petani kopi di

negara tersebut sebanyak 90 juta dolar Amerika per tahunnya (The Economist, 2006).

Belum lagi kasus yang terjadi di China, ketika pemerintah China mengeluarkan pengaturan mengenai *Foreign Direct Investment* (FDI) pada tahun 2017, yang berdampak pada banyaknya perusahaan yang masuk dan beroperasi di negara tersebut (Edelberg, 2017). Tujuannya adalah agar dapat mendukung pembangunan industri yang sedang dikembangkan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi negara (Zhang, 2017). Kebijakan ini merupakan bagian dari program pembangunan *Five Year Plan* yang dicanangkan oleh pemerintah China untuk melakukan reformasi ekonomi, termasuk implementasi *open-door policy* (Felipe, Dacuycuy, & Lanzafame, 2014). Salah satu bentuk kebijakan reformasi ini adalah *land reform*, dimana melalui kebijakan ini memungkinkan petani China untuk secara kolektif memberikan hak lahan pertaniannya kepada perusahaan. Akibatnya banyak lahan masyarakat yang sebelumnya diperuntukkan untuk bertani harus dialih fungsikan menjadi lahan perusahaan dan membuat para petani di China kehilangan mata pencaharian.

Konservasi lingkungan

Meskipun suatu negara dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perekonomiannya melalui pemanfaatan sumber dalam alam secara besar-besaran, sisi keberlanjutan pun kemudian menjadi sebuah pertanyaan besar (Drabsch, 2012). Alam memang menyediakan segala bentuk sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun karena permintaan yang banyak, adanya prospek keuntungan yang tinggi, menjadikan pemanfaatan tersebut justru mengarah ke eksploitasi.

Salah satu bentuk kasus eksploitasi yang terjadi adalah deforestasi yang terjadi di Indonesia sebagai akibat dari kebutuhan perluasan perkebunan kelapa sawit. Menurut *Greenpeace*, salah satu faktor masih terjadinya deforestasi di Indonesia adalah adanya permintaan yang tinggi dari berbagai perusahaan ternama, seperti *Unilever*, *Nestlé*, dan *PepsiCo* (Jong, 2018). Tingginya tingkat deforestasi juga tidak lepas dari perluasan lahan sawit karena permintaan minyak

kelapa sawit yang cukup tinggi dari berbagai negara, seperti dari negara-negara kawasan Afrika, Uni Eropa, India, dan Pakistan (Indonesia Investments, 2016). Di samping itu adanya dorongan pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan ekspor minyak kelapa sawit dari 7% menjadi 16% dari seluruh produk ekspor di tahun 2020 juga menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan hutan (Global Business Guide Indonesia, 2012). Minyak kelapa sawit pun menjadi komoditas ekspor terbesar bagi Indonesia (Yuliadi, 2018). Padahal beberapa dampak yang ditimbulkan adalah terancamnya habitat satwa, meningkatkan peluang terjadinya kepunahan, dan meningkatnya tingkat penangkapan hewan liar (WWF, 2017). Belum lagi dengan resiko polusi udara yang mengancam penduduk setempat akibat dari pembabatan hutan melalui aktivitas pembakaran.

Selain itu kehadiran korporasi juga menyebabkan permasalahan lingkungan berupa pencemaran limbah di China, yang membuat danau terbesar di China, Poyang, menjadi tercemar (Hoskins, 2017). Kasus pencemaran lingkungan yang ini melibatkan beberapa perusahaan pakaian ternama dunia, seperti *Zara*, *H&M*, dan *Tesco*. Menurut laporan yang dirilis oleh *Institute of Public and Environmental Affairs*, perusahaan pakaian ternama tersebut melanggar hukum lingkungan di China dengan mencemari sumber air dalam proses pembuatannya (The Huffington Post, 2013). Akibatnya, banyak masyarakat yang harus mencari sumber air baru dan banyak dari mereka yang terjangkit beberapa jenis penyakit.

Pelestarian dan promosi kebudayaan

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang mampu menyelaraskan antara modernitas dengan kebudayaan lokal setempat. Pembangunan harus dapat berdampingan dengan kearifan lokal melalui pelestarian dan promosi kebudayaan. Kebahagiaan pun akan tercipta apabila setiap orang memiliki kesempatan untuk mempertahankan identitas budayanya (GNH Centre Bhutan, 2018). Namun dalam beberapa kasus, pembangunan justru menggeser kebudayaan. Salah satunya terjadi di Amerika Serikat dalam kasus Keystone XL.

Keystone XL merupakan proyek yang diinisiasi oleh perusahaan bernama *TransCanada*. Proyek yang telah diinisiasi sejak tahun 2008 ini dibangun dengan tujuan untuk memindahkan 830,000 barel minyak mentah per harinya, dari Alberta di Kanada hingga ke Teluk Meksiko (Offutt, 2018). Proyek ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan bagi warga Amerika Serikat. Kebutuhan ini secara tidak langsung dapat terlihat melalui pernyataan Donald Trump, yang mengatakan bahwa proyek ini akan membuka sebanyak 48,000 lapangan pekerjaan (Sputnik News, 2018). Namun proyek Keystone XL ini mendapat banyak penolakan dari banyak pihak. Termasuk masyarakat suku adat di Kanada dan Amerika Serikat yang wilayah tempat tinggalnya masuk dalam rencana pembangunan proyek tersebut (Fontaine, 2017). Padahal pada saat kepemimpinan Presiden Barack Obama, karena alasan dapat memperburuk kondisi perubahan iklim, proyek ini pernah ditolak pada tahun 2012 dan tahun 2015 (Offutt, 2018).

Menurut Heather Brady dalam tulisannya yang berjudul “*4 Key Impacts of the Keystone XL and Dakota Access Pipelines*”, terdapat empat dampak utama yang dapat ditimbulkan dari proyek ini (Brady, 2017). Dari keempat dampak tersebut, Brady menyatakan bahwa pembangunan proyek ini akan mempengaruhi kehidupan warga suku adat. Beberapa bentuk diantaranya adalah pencemaran air dan tanah yang sangat merugikan bagi warga setempat (Brady, 2017). Rencana pembangunan ini dikhawatirkan akan merusak wilayah tempat tinggal para suku adat yang telah mereka tinggali sejak lama. Padahal di tempat itulah mereka selama ini berternak dan bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tidak hanya lingkungan dan mata pencaharian warga suku adat, pembangunan ini juga mengancam keberadaan beberapa situs budaya penting. Dua diantaranya adalah *Ponca Trail of Tears* dan *Ponca Chief Standing Bear Statue*, yang merupakan situs penting bagi Suku Indian (Indianz, 2018).

Good governance

Pemerintah suatu negara memiliki posisi dan peran penting dalam pengelolaan negara. Mereka harus dapat mengartikulasikan dan merealisasikan

apa yang dikehendaki oleh rakyat, dengan tetap mempertimbangkan beberapa aspek. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, memberikan kesempatan yang sama, serta menjunjung tinggi hak dan kebebasan individu (Stockdale, 2010). Oleh karena itu terdapat dua belas prinsip pemerintahan yang baik atau *good governance* yang bisa menjadi salah satu pedoman dan parameter baik tidaknya suatu pemerintahan. Setidaknya prinsip-prinsip *good governance* tersebut dapat membantu dalam pemenuhan kewajiban sebagai pemerintah. Beberapa diantara prinsip tersebut yaitu: *fair conduct of elections, representation, and participation; responsiveness; efficiency and effectiveness; openness and transparency; rule of law; ethical conduct; competence and capacity*, dan *innovation and openness to change* (Council of Europe, 2018).

Merujuk pada prinsip *ethical conduct*, seharusnya pemerintah lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segala dan harus menjauh dari praktik korupsi (Council of Europe, 2018). Namun yang terjadi sebaliknya, yaitu pemerintah lebih memihak kepentingan korporasi atau para pemilik modal, daripada mempertimbangkan kepentingan masyarakat dengan berbagai jenis pelanggaran, seperti suap dan korupsi. Contohnya korupsi yang banyak terjadi di sebagian negara-negara kawasan Afrika (Turner, 2017). Budaya suap dan korupsi sudah merajalela, seiring dengan peningkatan masuknya korporasi di ke negaranegara Afrika. Hukum pun dengan mudah diperjualbelikan melalui praktik suap. Bahkan menurut *Transparency International*, 75 juta warga Afrika terlibat dalam dalam kasus suap (Narfeldt, 2018). Celah ini lah yang kemudian dimanfaatkan oleh banyak korporasi internasional. Yaitu dengan mudahnya mereka mendapat ijin melalui suap, meskipun tidak memenuhi standar aturan maupun prosedur yang berlaku. Sehingga banyak korporasi yang masuk dan memanfaatkan sumber daya alam negara-negara di kawasan Afrika, namun justru menimbulkan kerugian bagi lingkungan dan masyarakat lokal (Turner, 2017). Salah satu kasus yang terkenal adalah yang kasus yang melibatkan mantan Presiden Afrika Selatan, Jacob Zouma. Dimana sebuah keluarga bisnis bernama Gupta melakukan suap kepada pemerintah untuk mengarahkan penunjukkan anggota kabinet, yang

kemudian dimanfaatkan untuk memperoleh kontrak proyek senilai ratusan juta dolar dari pemerintah Afrika Selatan (Conway-Smith, 2017).

Usaha Bhutan Memperkenalkan *Gross National Happiness* ke Dunia Internasional Sebagai Alternatif Indeks Keberhasilan Pembangunan Global

Dalam kerangka *counter-discourse* oleh Michael Foucault, pembangunan ekonomi beserta indeks pembangunan GDP dianggap hanya sebagai sebuah mitos dan kebenaran yang secara politis dibentuk oleh negara-negara Barat. Diskursus pembangunan ekonomi tidak lepas dari pemahaman kebahagiaan dari bangsa Barat, bahwa sumber kebahagiaan berasal dari hal-hal yang bersifat material (Saul, 2007). Namun diskursus pembangunan ekonomi yang telah lama terbangun ternyata tidak serta merta memberikan kebaikan dan kebahagiaan bagi negara dan masyarakat yang menganutnya. Diantaranya permasalahan dalam aspek ekonomi, budaya, lingkungan, dan pemerintahan yang semuanya bermuara pada ketidakbahagiaan masyarakat. Hal ini pun disadari oleh Senator John F. Kennedy dalam pidatonya di University of Kansas pada tanggal 18 Maret 1968 (Drabsch, 2012):

“It (GDP) measures neither our wit nor our courage, neither our wisdom nor our learning, neither our compassion nor our devotion to our country, it measures everything in short, except that which makes life worthwhile (Drabsch, 2012).”

Tidak hanya Senator John F. Kennedy, Raja Bhutan Jigme Singye Wangchuck pun memiliki pemikiran yang sama. Pernyataannya pada tahun 1972 bahwa *Gross National Happiness* lebih penting dari *Gross Domestic Product* menjadi buktinya (Hale, 2018). Bhutan pun mulai memperkenalkan GNH ke dunia internasional sebagai sebuah indeks pembangunan sekaligus awal mula perjuangan Bhutan dalam melakukan *counter-discourse*.

Diawali dari diakuinya GNH oleh PBB dalam sebuah *non-binding resolution* pada tanggal 19 Juli 2011 (United Nations, 2011). Artinya mayoritas

negara-negara anggota PBB sepakat bahwa kebahagiaan menjadi salah satu bagian penting dalam pembangunan. Secara tidak langsung dengan disetujuinya *non-binding resolution* ini membuka peluang GNH untuk menjadi alternatif indeks pembangunan selain GDP. Di samping itu, dalam rangka melakukan *counter-discourse* Bhutan juga memiliki beberapa kebijakan sebagai bentuk implementasi dari GNH. Melalui kebijakan-kebijakan ini, Bhutan juga mengajak dunia internasional untuk menerapkan pembangunan yang *people-oriented*, dengan kebahagiaan sebagai salah satu aspek utama yang perlu dipertimbangkan.

Bhutan Water Policy

Contoh kebijakan pertama adalah *Bhutan Water Policy*. Dalam kebijakan ini Bhutan memiliki visi bahwa air harus dapat mencukupi kebutuhan saat ini dan generasi mendatang untuk menjaga kualitas hidup serta menjaga hubungan antara alam dengan manusia (Royal Government of Bhutan, 2007). Salah satu yang mendasari visi ini adalah bahwa alam, manusia, dan air saling bergantung satu sama lain dan harus bisa hidup berdampingan secara harmonis (Royal Government of Bhutan, 2007). Bhutan sendiri memiliki banyak sumber air, seperti sungai dan danau glasial (Singh & Karki, 2004). Sebelumnya pemanfaatan sumber air ini bukanlah suatu masalah, karena hanya diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan irigasi. Namun dalam perkembangannya konsumsi kebutuhan sehari-hari dan irigasi semakin meningkat. Belum lagi ancaman banjir dari danau glasial bagi beberapa wilayah di Bhutan sebagai efek dari perubahan iklim yang ekstrim (Royal Government of Bhutan, 2007). Oleh karena itu, kondisi ini dianggap mendesak oleh pemerintah Bhutan untuk membuat suatu manajemen pengelolaan air. Selain untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat, manajemen pengelolaan air ini penting untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Untuk itu Bhutan pun menjalankan beberapa proyek manajemen pengelolaan air, dua diantaranya adalah sektor *hydropower* serta irigasi dan sumber daya terbarukan. Contoh proyek *hydropower* yang terkenal adalah *Chhukka Hydropower Project* dan *Mangdechu Project*. Sedangkan untuk contoh proyek irigasi adalah *The Lingmutey Chhu Watershed*

Project. Dimana merupakan hasil kerjasama dari pemerintah Bhutan dengan *International Development Research Center (IDRC)* dan *The Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)* (Singh & Karki, 2004). Tujuannya yaitu agar distribusi air irigasi dan menyelesaikan konflik yang terjadi akibat adanya perebutan sumber antar petani (Bhutan Water Partnership, 2016).

Cara Bhutan dalam menghargai dan memanfaatkan air menggambarkan bahwa adanya keterkaitan secara spiritual masyarakatnya dengan ekosistem (Chhopel, 2014). Menurut Cameron Ironside dalam artikelnya yang berjudul “*Bhutan and hydropower: can public happiness drive policy?*”, menyatakan bahwa kebijakan pembangunan *hydropower* merupakan salah satu contoh implementasi ketika kebahagiaan menjadi salah satu elemen penting dalam pembuatan kebijakan (Ironside, 2014). Bahkan menurut Tinley Dorji, direktur eksekutif *Dagachhu Project*, mengatakan bahwa *hydropower* merupakan tulang punggung Bhutan, yang tidak lepas dari kontribusinya pada pemasukan dan pembawa kebahagiaan (Mallet, 2014).

Gross National Happiness Centre Bhutan

Bhutan juga membentuk organisasi non-profit yang dipimpin oleh Putri Ashi Kezang Choden Wangchuck dengan nama *Gross National Happiness Centre Bhutan* (GNH Centre Bhutan, 2018). Tujuan dari dibentuknya organisasi non-profit ini adalah untuk mengenalkan sekaligus mempromosikan GNH sebagai sebuah indeks alternatif pembangunan. Salah satu usaha untuk mempromosikan dan mengenalkan GNH adalah dengan bekerjasama dengan *Schumacher College*. Salah satu bentuk programnya adalah *The GNH Masterclass*. Adanya program ini dilatarbelakangi oleh keunikan Bhutan yang semakin mendapat perhatian dunia internasional, yaitu paradigma pembangunannya dan indeks pembangunan alternatif *Gross National Happiness* (Schumacher College, 2017). Sehingga para peserta akan diajak untuk merasakan bagaimana hidup di negara dengan kebahagiaan sebagai ‘roh’ utama dari kehidupan dan pembangunannya.

Gross National Happiness Sebagai Alternatif Indeks Pembangunan Global

Usaha Bhutan dalam memperkenalkan GNH sebagai bentuk *counter-discourse* terhadap GDP pun tidak sia-sia. Dunia internasional mulai menaruh perhatian terhadap aspek kebahagiaan dalam pembangunan. Pendekatan pembangunan dari GNH membuat berbagai pihak tertarik untuk mempelajari lebih dalam, memberikan pengakuan, hingga ikut mempromosikannya. Secara perlahan, GNH mulai mendapat tempat di dunia internasional sebagai sebuah indeks pembangunan alternatif selain GDP. Beberapa bukti bahwa dunia internasional mulai menjadikan GNH sebagai alternatif indeks pembangunan, yaitu:

World Happiness Report

Salah satu bukti bahwa dunia internasional telah mulai peduli pada kebahagiaan adalah dengan terbitnya *World Happiness Report* untuk pertama kalinya pada tahun 2012 (Schultz, 2017). Laporan ini merupakan hasil dari *UN High Level Meeting on happiness and well-being* yang diselenggarakan pada tahun 2012 (Helliwell, Layard, & Sachs, 2017). Pertemuan yang dipimpin oleh Bhutan tersebut dihadiri oleh 800 peserta, termasuk kepala negara, delegasi negara, organisasi internasional, hingga akademisi (Bhutan, 2012). Bahkan Profesor Joseph Stiglitz, Profesor Jeffrey Sachs, dan Direktur Eksekutif *UN Women* Michelle Bachelet turut menjadi pembicara dalam sesi panel diskusi pertemuan tersebut (Bhutan, 2012). Adanya laporan ini bertujuan agar kebahagiaan dapat menjadi tolok ukur dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, sekaligus menjadi salah satu pertimbangan utama dari kebijakan publik bagi negara-negara di dunia (Helliwell, Layard, & Sachs, 2017). Pendapatan, harapan hidup, angka korupsi, dan kemurahan hati pun menjadi beberapa elemen yang digunakan dalam *World Happiness Report* untuk mengukur tingkat kebahagiaan negara (International Day of Happiness, 2018).

Dengan tujuan untuk terus mengingat pentingnya kebahagiaan, tanggal 20 Maret ditetapkan sebagai hari kebahagiaan dunia. Penetapan ini didasarkan atas resolusi PBB "*International Day of Happiness*", sebagai hasil dari *UN Conference on Happiness* pada tanggal 12 Juli 2012 (United Nations, 2012).

Bhutan sebagai negara yang dikenal sangat menaruh perhatian pada kebahagiaan pun menjadi negara yang menginisiasi resolusi tersebut (United Nations, 2012). Sejak saat itu pula laporan indeks kebahagiaan negara-negara di dunia selalu terbit dan diperbaharui data-datanya setiap tahun. Adanya pengakuan terhadap pentingnya kebahagiaan ini didukung oleh berbagai pihak. Salah satunya adalah direktur *United Nations Development Programme* (UNDP) yang menolak “*tyranny of GDP*” dengan berpendapat bahwa kebahagiaan harus menjadi fokus utama agar dapat membangun manusia dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan (Helliwell, Layard, & Sachs, 2017). Bahkan pada tahun 2016, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) pun berkomitmen untuk menempatkan kesejahteraan sebagai aspek utama yang diperjuangkan oleh pemerintah negara (Helliwell, Layard, & Sachs, 2017).

GNH sebagai bentuk aspirasi dari tujuan pembangunan global

Pada tahun 2011 Majelis Umum PBB memberikan izin Bhutan untuk dapat mengenalkan filosofi *Gross National Happiness* kepada negara-negara lain dalam sesi panel untuk berbicara tentang kesejahteraan dan kebahagiaan (United Nations, 2011). Bahkan dalam *non-binding resolution* PBB “*Happiness: towards a holistic approach to development*” dinyatakan pula bahwa kebahagiaan sebagai tujuan universal dianggap sebagai salah satu bentuk aspirasi dan refleksi dari *Millenium Development Goals* (MDGs) (United Nations, 2011).

GNH juga dianggap sebagai representasi dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dibandingkan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, GNH pun dinilai lebih komprehensif dengan fokusnya pada ekonomi, budaya, lingkungan, dan emosi individu. Hasilnya pada tahun 2016 pemerintah Bhutan bersama dengan PBB melakukan kerjasama untuk menyukseskan *the Himalayan Kingdom's 12th Five Year Plan* (UNDP, 2016). Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk menciptakan tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan lebih berorientasikan hasil, serta agar proses pembangunan dengan lebih mudah untuk diukur tingkat kemajuan (*progress*) dan keberhasilannya (UNDP, 2016). Sehingga secara tidak langsung PBB telah

mengakui GNH sebagai sebuah alternatif indeks pembangunan dengan implementasi awal dalam bentuk rencana pembangunan nasional.

Internasionalisasi Gross National Happiness Centre

Selain dari PBB, GNH juga secara tidak langsung diakui sebagai alternatif indeks pembangunan oleh beberapa negara. Salah satunya yaitu Thailand melalui kehadiran *GNH Centre Thailand*. Pada tahun 2016, pimpinan *GNH Centre Bhutan*, Putri Ashi Kezang Choden Wangchuck, secara langsung melakukan penandatanganan MoU pendirian *GNH Centre* di Thailand (Pattaya Mail, 2016). Kehadiran *GNH Centre* di Thailand ini tidak lepas dari adanya kemiripan antara filosofi GNH dengan *Sufficiency Economy Philosophy* milik Thailand (Sassaman, 2016). *Sufficiency Economy Philosophy* atau SEP sendiri merupakan filosofi pembangunan yang dicetuskan oleh mendiang raja Thailand, Raja Bhumibol Adulyadej, pada tahun 1974 (TICA, 2013). Dicetuskannya filosofi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan tingkat kebahagiaan masyarakat Thailand (Royal Thai Consulate-General India, 2014). Filosofi ini pun memiliki pilar yang kurang lebih sama dengan GNH, yaitu keseimbangan antara ekonomi, masyarakat, lingkungan, dan budaya (Royal Thai Consulate-General India, 2014). Sehingga karena kemiripan inilah yang membuat GNH diakui oleh Thailand melalui pendirian *GNH Centre Thailand*.

Kesimpulan

Penelitian ini telah menemukan bahwa telah terjadi fenomena *counter-discourse* paradigma pembangunan yang dianut oleh Bhutan terhadap paradigma pembangunan yang menjadi rujukan mayoritas negara di dunia. *Counter-discourse* terjadi antara diskursus pembangunan ekonomi beserta indeks GDP dengan diskursus pembangunan berlandaskan kebahagiaan beserta indeks GNH.

Menggunakan perspektif kritik Michael Foucault terhadap hegemoni suatu kebenaran, penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Bhutan menawarkan GNH sebagai alternatif paradigma pembangunan global merupakan bentuk *counter-discourse* terhadap GDP seperti yang telah dikonstruksikan oleh negara-negara

Barat. Hal ini disebabkan karena GDP sebagai indikator keberhasilan pembangunan tidak berhasil dan tidak relevan dalam mengukur serta membawa dan kebahagiaan. Tidak hanya faktor absennya aspek kebahagiaan, Bhutan pun merasa paradigma pembangunan yang dikonstruksi oleh negara-negara Barat tidak benar-benar mendatangkan kesejahteraan dan hanya merugikan berbagai negara, khususnya negara-negara berkembang. Usaha *counter-discourse* pun telah dilakukan oleh Bhutan melalui berbagai bentuk kebijakan. Seperti melalui *Bhutan Water Policy*, proyek kerjasama bilateral *hydropower*, pembentukan GNH Centre, hingga memimpin pertemuan yang menghasilkan *World Happiness Report*. Hasilnya, dunia internasional mulai menaruh perhatian khusus pada GNH, baik dalam bentuk sebagai alternatif indeks pembangunan maupun kebahagiaan sebagai aspek yang krusial dalam penentuan suatu kebijakan pembangunan.

Referensi

BUKU

- Clark, A. E., & Senik, C. (2011). *Will GDP growth increase happiness in developing countries?* Paris: Paris Jordan Sciences Economiques.
- Conceição, P., & Bandura, R. (2008). *Measuring Subjective Wellbeing: A Summary Review of the Literature*. New York: Office of Development Studies UNDP.
- Dang, G., & Pheng, L. S. (2015). *Infrastructure Investments in Developing Economies: The Case of Vietnam*. Singapore: Springer.
- Drabsch, T. (2012). *Measuring Wellbeing*. Sydney: NSW Parliamentary Research Service.
- Easterlin, R. A. (1974). Does Economic Growth Improve the Human a Lot? Some Empirical Evidence. In P. A. David, & M. W. Reder, *Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honor of Moses Abramovitz* (pp. 89-125). New York: Academic Press.
- Haque, M. S. (2004). The Myths of Economic Growth (GNP): Implications for Human Development. In G. Mudacumura, & M. S. Haque, *Handbook of Development Policy Studies* (pp. 1-24). New York: Marcel Dekker.

Royal Government of Bhutan. (2007). *Bhutan Water Policy*. Thimphu: National Environment Commission.

Singh, N., & Karki, S. (2004). *Discourse, Legislative Framework and Practice on Integrated Water Resources Management in Bhutan*. Kathmandu: International Union for Conservation of Nature.

JURNAL

Beaulier, S. A. (2004). Is Discourse Relevant for Economic Development? *The Independent Review*.

Chhopel, G. K. (2014). Sustainability of Bhutan's Hydropower. *Hydro Nepal*, 73-76.

Fidelis, A. C., Tisott, P. B., & Rodrigues, R. G. (2017). Gross National Happiness: Statistical Model with Open Data. *XII Mostra de Iniciacao Cientifica*, 1-9.

Helliwell, J., Layard, R., & Sachs, J. (2017). *World Happiness Report 2017*. New York: Sustainable Development Solutions Network.

Madalina, C. (2015). GDP vs GNH. A New Paradigm. *Academica Brâncuși*, 349-354.

Yuliadi, I. (2018). The Role of Crude Palm Oil (CPO) Commodities in Indonesian Economy Granger Causality Analysis Approach. *International Journal of Management and Applied Science*, 26-30.

Zhang, K. H. (2017). *Urbanization and Industrial Development in China*. Springer, 22.

REPORTS & PROCEEDINGS

Bhutan Water Partnership. (2016). *The Project to Promote Efficient Water Resources Management Techniques Among Vulnerable Communities in Bhutan Thereby Reduce Poverty*. Battaramulla: Global Water Partnership.

Eiras, A. I. (2003). *IMF and World Bank Intervention: A Problem, Not A Solution*. Washington, DC: The Heritage Foundation.

Felipe, J., Dacuycuy, C., & Lanzafame, M. (2014). *The Declining Share of Agricultural Employment in the People's Republic of China: How Fast?* Manila: Asian Development Bank.

Igwe, I. O. (2018). History of the International Economy: The Bretton Woods System and its Impact on the Economic Development of Developing Countries. *Athens Journal of Law*, 106.

Saul, J. R. (2007). Good Governance as the Key to Gross National Happiness . *Rethinking Development* (pp. 12-30). Thimphu: The Centre for Bhutan Studies.

WEBSITE

Amadeo, K. (2018, Oktober 23). *US GDP by Year Compared to Recessions and Events*. Retrieved from The Balance: <https://www.thebalance.com/us-gdp-by-year-3305543>

Bhutan. (2012). *Defining A New Economic Paradigm: The Report of the High-level Meeting on Wellbeing and Happiness*. Retrieved from United Nations: <https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=617&menu=35>

Brady, H. (2017, Januari 25). *4 Key Impacts of the Keystone XL and Dakota Access Pipelines*. Retrieved from The National Geographic: <https://news.nationalgeographic.com/2017/01/impact-keystone-dakota-access-pipeline-environment-global-warming-oil-health/>

Collins, H. (2016, Oktober 26). *The Danger of Development Labels*. Retrieved from International Affairs Review: <http://www.iar-gwu.org/content/danger-development-labels>

Conway-Smith, E. (2017, Desember 13). *Global companies snared in South Africa's corruption scandal*. Retrieved from Financial Post: <https://business.financialpost.com/pmnl/business-pmn/global-companies-snared-in-south-africas-corruption-scandal>

Council of Europe. (2018). *12 Principles of Good Governance and European Label of Governance Excellence (ELoGE)*. Retrieved from Council of Europe: [https://www.coe.int/en/web/good-governance/12-principles-and-elope#{"25565951":\[5\]}](https://www.coe.int/en/web/good-governance/12-principles-and-elope#{)

- Czech, B. (2015, Juli 20). *5 Myths About Economic Growth*. Retrieved from The Huffington Post: https://www.huffingtonpost.com/brian-czech/five-myths-about-economic_b_7828348.html
- Economic and Social Research Council. (2018). *The Easterlin Paradox*. Retrieved from Economic and Social Research Council: <https://esrc.ukri.org/about-us/50-years-of-esrc/50-achievements/the-easterlin-paradox/>
- Eda Hiro, J. (2017, November 30). *GPI, GNH, GCH: True Indicators of Progress*. Retrieved from Japan for Sustainability: https://www.japanfs.org/en/news/archives/news_id027838.html
- Edelberg, P. (2017, November 8). *Is China Really Opening Its Doors to Foreign Investment?* Retrieved from China Business Review: <https://www.chinabusinessreview.com/is-china-really-opening-its-doors-to-foreign-investment/>
- Faris, S. (2007, Februari 26). *Starbucks vs Ethiopia*. Retrieved from Fortune Magazine: http://archive.fortune.com/magazines/fortune/fortune_archive/2007/03/05/8401343/index.htm
- Fontaine, T. (2017, Maret 27). *'A perilous pipeline': Indigenous groups line up against Keystone XL*. Retrieved from CBC News: <https://www.cbc.ca/news/indigenous/indigenous-groups-keystonexl-2017-approval-1.4042381>
- Global Business Guide Indonesia. (2012). *Overview of Palm Oil in Indonesia*. Retrieved from Global Business Guide Indonesia: http://www.gbgingonesia.com/en/agriculture/article/2011/overview_of_palm_oil_in_indonesia.php
- GNH Centre Bhutan. (2018). *About Us*. Retrieved from GNH Centre Bhutan: <http://www.gnhcentrebhutan.org/about/>
- GNH Centre Bhutan. (2018). *The 4 Pillars of GNH*. Retrieved from GNH Centre Bhutan: <http://www.gnhcentrebhutan.org/what-is-gnh/the-4-pillars-of-gnh/>
- Hafsah. (2017, Mei 20). *The Easterlin Paradox Explained*. Retrieved from The Global Millennial: <https://globalmillennial.org/2017/05/20/the-easterlin-paradox/>
- Hale, E. (2018, Maret 5). *In Bhutan, gross national happiness more important than GDP*. Retrieved from National Post:

<https://nationalpost.com/pmn/travel-pmn/in-bhutan-gross-national-happiness-more-important-than-gdp>

Hoskins, T. (2017, Juni 13). *H&M, Zara and Marks & Spencer Linked to Polluting Viscose Factories in Asia*. Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/jun/13/hm-zara-marks-spencer-linked-polluting-viscose-factories-asia-fashion>

Indianz. (2018, Juli 31). *Keystone XL Pipeline advances despite incomplete surveys of tribal sites*. Retrieved from Indianz: <https://www.indianz.com/News/2018/07/31/keystone-xl-pipeline-advances-despite-in.asp>

Indonesia Investments. (2016, Juni 2). *Export & Production*. Retrieved from Indonesia Investments: <https://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/crude-palm-oil-industry-update-indonesia-cpo-export-production/item6879?>

International Day of Happiness. (2018). *World Happiness Report*. Retrieved from International Day of Happiness: <http://www.dayofhappiness.net/report/>

Ironside, C. (2014, Oktober 17). *Bhutan and hydropower: can public happiness drive policy?* Retrieved from International Hydropower Association: <https://www.hydropower.org/blog/bhutan-and-hydropower-can-public-happiness-drive-policy>

Jong, H. N. (2018, September 28). *Indonesia: Palm Oil Linked to Deforestation Remains on Store Shelves*. Retrieved from The News Lens: <https://international.thenewslens.com/article/104923>

Moyo, L. (2014, September 30). *The Toll of Coffee on Ethiopia's Trade and More*. Retrieved from Ethiopia: <http://wordpress.clarku.edu/id252-ethiopia/2014/09/30/the-toll-of-coffee-on-ethiopias-trade-and-more/>

Narfeldt, S. (2018, Maret 27). *Why bribery in Africa can no longer be tolerated*. Retrieved from World Economic Forum: <https://www.weforum.org/agenda/2018/03/why-bribery-in-africa-can-no-longer-be-tolerated/>

Offutt, L. (2018, September 12). *Native Americans File Lawsuit Claiming Keystone XL Pipeline Violates Treaty Boundaries*. Retrieved from Jurist: <https://www.jurist.org/news/2018/09/native-americans-file-lawsuit-claiming-keystone-xl-pipeline-violates-treaty-boundaries/>

- Pattaya Mail. (2016, Oktober 13). *Gross National Happiness Center established in Thailand*. Retrieved from Pattaya Mail:
<http://www.pattayamail.com/thailandnews/gross-national-happiness-center-established-thailand-151924>
- Pettinger, T. (2016). *Does economics growth bring increased living standards?* Retrieved from Economics Help:
<https://www.economicshelp.org/essays/economics-growth-happiness/>
- Royal Thai Consulate-General India. (2014). *Philosophy of "Sufficiency Economy"*. Retrieved from Royal Thai Consulate-General, Chennai, India:
<http://www.thaiembassy.org/chennai/th/news/4112/53868-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87-%28Philosop>
- Sassaman, G. (2016, Oktober 15). *New Gross National Happiness Center in Thailand*. Retrieved from Gross National Happiness USA:
<http://gnhusa.org/inspiring-news/new-gross-national-happiness-center-in-thailand/>
- Schultz, K. (2017, Januari 18). *In Bhutan, Happiness Index as Gauge for Social Ills*. Retrieved from New York Times:
<https://www.newyorktimes.com/2017/01/17/world/asia/bhutan-gross-national-happiness-indicator-.html>
- Schumacher College. (2017, Februari 17). *The GNH Masterclass: An Advanced Program on Implementing GNH*. Retrieved from Schumacher College:
<https://www.schumachercollege.org.uk/news/the-gnh-masterclass%3A-an-advanced-program-on-implementing-gnh>
- Sputnik News. (2018, November 10). *Keystone XL Pipeline Violates Indigenous People's Treaty Rights*. Retrieved from Sputnik News:
<https://sputniknews.com/analysis/201811101069680300-keystone-xl-pipeline-violates-indigenous-peoples-treaties/>
- Stockdale, N. (2010, Desember 23). *What is a government's primary responsibility?* Retrieved from Dallas News:
<https://www.dallasnews.com/opinion/opinion/2010/12/23/what-is-a-gover>

- The Economist. (2006, November 30). *Starbucks v Ethiopia: Storm in a Coffee Cup*. Retrieved from The Economist:
<https://www.economist.com/node/8355026>
- The Huffington Post. (2013, April 23). *Major Retailers Contribute To Severe Water Pollution in China: Report*. Retrieved from The Huffington Post:
https://www.huffingtonpost.com/2012/04/23/china-water-pollution-fashion-textile-factories_n_1445766.html
- TICA. (2013). *Sufficiency Economy Philosophy: Thailand's Home-Grown Approach to Sustainable Development*. Retrieved from Thailand Interational Cooperation Agency (TICA):
<http://www.tica.thaigov.net/main/en/information>
- Turner, G. (2017, Maret 29). *Corruption in Africa: Misleading index and bribery by foreign companies*. Retrieved from Tax Justice Network:
<https://www.taxjustice.net/2017/03/29/corruption-africa-misleading-index-bribery-foreign-companies/>
- UNDP. (2016, Oktober 12). *The Kingdom of Bhutan and the United Nations join forces on Gross National Happiness and the Sustainable Development Goals*. Retrieved from United Nations Development Programme:
<http://www.undp.org/content/bhutan/en/home/presscenter/pressreleases/2016/10/12/the-kingdom-of-bhutan-and-the-united-nations-join-forces-on-gross-national-happiness-and-the-sustainable-development-goals/>
- United Nations. (2011, Agustus 25). *Happiness: towards a holistic approach to development* . Retrieved from DAG Repository:
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/291712/A_RES_65_309-EN.pdf?sequence=3&isAllowed=y
- United Nations. (2012). *International Day of Happiness*. Retrieved from United Nations: <http://www.un.org/en/events/happinessday/background.shtml>
- USC Dornsife. (2018). *Richard A. Easterlin*. Retrieved from USC Dornsife:
<https://dornsifecms.usc.edu/richard-a-easterlin/>
- WWF. (2017). *Borneo Deforestation*. Retrieved from World Wide Fund for Nature (WWF):
http://wwf.panda.org/our_work/forests/deforestation_fronts/deforestation_in_borneo_and_sumatra/